



LIBUR NATARU PARIWISATA TETAP JALAN

Tidak Patuh Prokes, Silakan Tindak Tegas

PEMERINTAH pusat memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang. Hal itu diperkuat dengan Instruksi Mendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 saat Nataru.

Keputusan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 itu diterapkan di semua provinsi di Indonesia untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karena berdasar pengalaman, setiap momentum libur Nataru jumlah kunjungan ke destinasi wisata mengalami kenaikan. Dampak dari meningkatnya mobilitas masyarakat, dikhawatirkan bisa memicu terjadinya kerumunan. Karena itu, pemerintah menilai perlu dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan pembatasan (PPKM Level 3) dan memperketat penegakan protokol kesehatan (prokes).

"Kami akan berusaha untuk melaksanakan kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru dengan sebaik-baiknya. Meski begitu belum ada rencana melakukan penekanan di daerah perbatasan. Selain dalam pelaksanaannya tidak mudah, banyaknya jalan masuk ke DIY dari Jawa Tengah juga menjadi salah satu pertimbangan. Untuk itu, rencananya kami hanya akan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap orang yang melintas. Karena jika semua pengendaraan yang lewat dilakukan pemeriksaan, selain tidak efektif juga bisa menimbulkan kemacetan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Drs K Baskara Aji.

Dikatakan, apabila kebijakan PPKM Level 3 saat Nataru sudah mulai diterapkan di semua provinsi, Pemda DIY tidak akan melakukan penutupan destinasi wisata. Karena dalam kondisi seperti sekarang di mana sudah dilakukan sejumlah pelanggaran, untuk melakukan penutupan tempat wisata rasanya sulit. Jadi yang bisa dilakukan adalah menerapkan



Wisatawan menikmati Malioboro dengan prokes ketat.

pembatasan diimbangi dengan penegakan prokes secara ketat di destinasi wisata.

Tentunya upaya pengetatan atau pengawasan berkaitan dengan penegakan prokes itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata atau pengelola destinasi wisata, tapi perlu peran aktif masyarakat termasuk wisatawan, karena mereka memiliki kontribusi cukup besar dalam penegakan prokes.

"Saya kira adanya Instruksi Mendagri soal PPKM Level 3 sudah cukup bagus. Termasuk melakukan pembatasan di kafe, tempat makan dan pusat-pusat perbelanjaan.

Tugas pemerintah daerah adalah menjaga agar kebijakan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, termasuk penegakan prokes di destinasi wisata. Selain itu, dalam momentum Nataru tidak boleh ada kegiatan mudik atau bepergian ke luar daerah guna mencegah terjadinya penularan," terangnya.

Terkait pembatasan tempat wisata, Baskara Aji meminta destinasi wisata benar-benar mematuhi aturan. Apabila kedatangan ada destinasi wisata yang pengunjungnya lebih 50 persen, maka akan ditutup sementara waktu. Apabila tempat itu sudah menegakkan prokes secara baik

baru bisa menerima tamu. Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo menyatakan, selain melakukan pengawasan, pihaknya akan meninjau kembali kesiapan tempat wisata untuk menghadapi libur Nataru. Bahkan untuk mengoptimalkan hal itu pihaknya akan mengerahkan tim untuk memastikan protokol kesehatan dan prasarana pendukungnya diterapkan dengan baik. Masalah kesiapan tidak hanya dari fasilitas pendukung prokes tapi juga SDM dan penerapan aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan skrining.

"Kebijakan pemerintah menerapkan PPKM Level 3 selama Nataru menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi ancaman gelombang ketiga Covid-19. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan harus disikapi bersama-sama. Karena PPKM Level 3 aktivitas pariwisata tetap jalan, yang perlu ditingkatkan adalah kewaspadaan dan penerapan prokes secara ketat," jelasnya.

Singgih menyatakan, agar poin-poin yang ada dalam PPKM Level 3 bisa diterapkan dengan baik, masyarakat termasuk wisatawan diminta bisa mematuhi prokes di mana pun berada. Apalagi saat ini sejumlah destinasi wisata di Yogya

sudah menerima pengunjung baik dari dalam maupun luar daerah. "Dalam PPKM Level 3 nanti, pengetatan yang dilakukan lebih ke arah membatasi pengunjung, meningkatkan prokes, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai bentuk kewaspadaan. Jangan sampai terjadi euforia yang menjadikan masyarakat lengah dan bisa mengakibatkan terjadinya penularan Covid-19," katanya. Singgih menambahkan, untuk memperketat penerapan prokes saat libur Nataru ini, pihaknya akan membuat kesepakatan dengan pengelola destinasi terkait dengan kapasitas. Jangan sampai Satgas Covid-19 mengatakan sudah penuh, tapi pengelola belum, jadi bisa merepotkan.

"Supaya prokes ini ditegakkan, hotel maupun destinasi wisata misalnya wajib CHSE. Selain itu pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi juga perlu dimaksimalkan, kalau misalnya tidak ada, bisa memanfaatkan aplikasi visting Jogja yang sudah terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi," ujar Singgih.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono menegaskan, karena sudah menjadi keputusan pemerintah pusat dan

akan diterapkan di semua provinsi di Indonesia, pihaknya akan mematuhi kebijakan dari pemerintah.

Hanya saja, kebijakan untuk tidak melarang orang bepergian penting untuk memberikan napas pada sektor pariwisata. Karena momentum akhir tahun merupakan momentum yang bisa membuat okupansi naik. Tapi tentunya prokes menjadi suatu keharusan untuk ditaati semua pengurus PHRI. Semua itu harus dilakukan agar sektor ekonomi dan kesehatan bisa berjalan beriringan.

"Salah satu cara agar prokes tetap berjalan dengan ketat adalah dengan penindakan. Untuk itu kami meminta petugas tak segan menindak pengelola wisata, terlebih anggota PHRI yang melanggar prokes. Silakan tindak pengelola wisata anggota kami dan masyarakat yang tidak patuh prokes. Karena penegakan prokes akan bisa dilaksanakan dengan baik jika ada komitmen bersama," katanya.

Deddy menambahkan, pihaknya meminta agar semua anggota PHRI selalu mengedepankan penegakan prokes. Jadi untuk hotel sendiri selama ini sudah menggunakan prokes secara ketat. Bahkan untuk memastikan hal itu Satgas PHRI secara rutin melakukan pemantauan kepada anggotanya. Karena PHRI DIY berkomitmen jangan sampai ada klaster di hotel dan restoran.

"Saat ini kapasitas hotel yang beroperasi adalah 70 persen dari total kamar. Okupansi pun sudah mulai meningkat, terutama di akhir pekan di mana bisa tembus okupansi 80 persen dari 70 persen kamar yang dibuka. Meski begitu capaiannya belum bisa dikatakan optimal. Mudah-mudahan di momentum Nataru okupansi bisa lebih meningkat," kata Deddy pula. (Ria)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 15 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005